



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN  
PERMUKIMAN  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sarilamak, Januari 2020



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		Hal i
Daftar Isi		ii
BAB I	<b>PENDAHULUAN</b>	I-1
	A. Latar Belakang	I-1
	B. Tugas dan Wewenang	I-2
	C. Sumber Daya Perangkat Daerah	I-6
BAB II	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	II-1
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	II-1
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	II-2
BAB III	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	III-1
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	III-1
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	III-2
	D. Permasalahan dan Isu-isu Strategis	III-31
	E. Realisasi Anggaran	
BAB IV	<b>PENUTUP</b>	IV-1
	A. Kesimpulan	IV-1
	B. Langkah Peningkatan Masa Datang	IV-1
Lampiran		

## ***Ikhtisar Eksekutif***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 - 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman terkait dengan urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat dan Permukiman. Pada tahun 2019 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 25.936.164.600,- setelah Perubahan APBD Tahun 2019 menjadi Rp.29.023.645.935. Anggaran ini terdiri dari Belanja Langsung

Belanja langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja langsung ini di alokasikan untuk pelaksanaan 10 Program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 khususnya yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 28.375.333.874,-. Jumlah tersebut mencapai 97.76 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 29.023.645.935,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis mengalami peningkatan sebesar 2.48%, dimana tingkat serapan pada tahun lalu adalah sebesar 95.28%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena hampir semua indikator dapat diwujudkan 100 %.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat

Sedangkan sasaran dari [Laporan Kinerja](#) Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG**

### **Kedudukan**

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, Perumahan rakyat dan Permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman. Dimana tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan Lingkungan Hidup dan urusan Perumahan Permukiman. yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Struktur Organisasi**

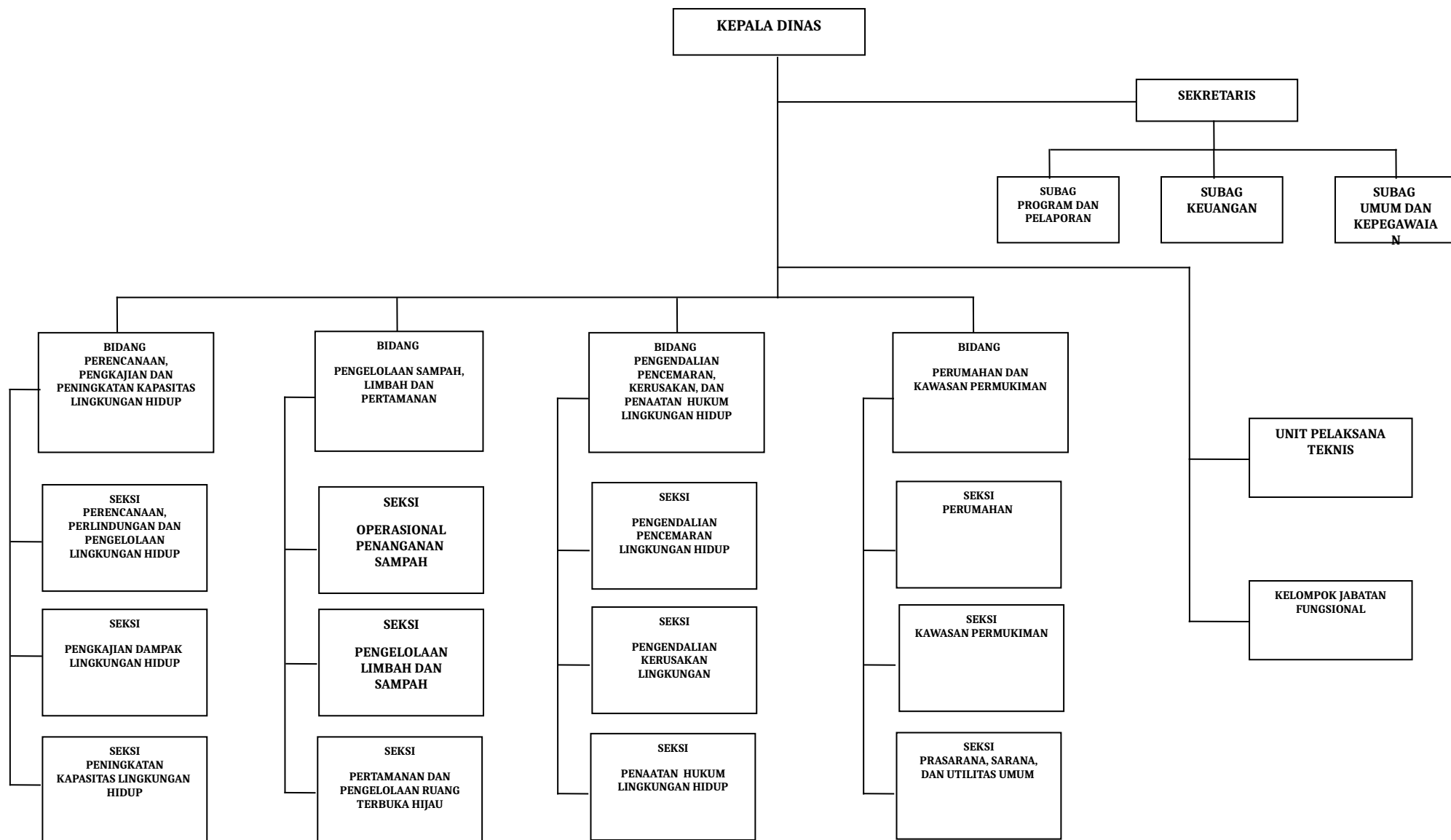
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- a. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  1. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan, terdiri dari:
  1. Seksi Operasional Penanganan Sampah;
  2. Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan
  3. Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.



- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - 3. Seksi Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perumahan;
  - 2. Seksi Kawasan Permukiman; dan
  - 3. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

## Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota



## **Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas,maka Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman,
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pembinaan,pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;  
dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Sumber Daya Perangkat Daerah

#### Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 34 orang PNS dan 21 Orang Pegawai Harian Lepas ( PHL) , secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Dinas,1 Sekretaris Dinas. 4 Kepala Bidang dan 15 Kasubag/ Kasi. Berdasarkan Tingkatan pendidikan nya pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel dibawah

#### Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
<b>PNS</b>		
<b>1</b>	S2 (Pasca Sarjana)	<b>9</b>
<b>2</b>	S1 (Sarjana)	<b>16</b>
<b>3</b>	Diploma III	<b>5</b>
<b>4</b>	SLTA	<b>4</b>
	Jumlah PNS	<b>34</b>
<b>PHL</b>		
<b>1</b>	S1 (Sarjana)	<b>6</b>
<b>2</b>	Diploma III	<b>2</b>
<b>3</b>	SLTA	<b>12</b>
	<b>Jumlah PHL</b>	<b>20</b>

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat – diklat Amdal, diklat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Diklat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling,

Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### **Sarana Prasarana**

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota .

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman didukung oleh :

#### **Infentarisasi Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota**

NO	J E N I S	SATUAN	JUMLAH
1	Gedung Kantor	Unit	3
2.	Gedung Laboratorium	Unit	1
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	4
4	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	20
5	Kendaraan Dinas Roda 3 (Becak Motor)	Unit	1
6	Mesin Potong Rumput	Unit	3
7	Meja dan Kursi Kerja	Unit	90
8	Kursi Stainless	Unit	2
9	Filling Cabinet	Unit	5
10	Lemari Arsip	Unit	20
11	Lemari Kayu	Unit	4
12	Komputer PC	Unit	8
13	Laptop	Unit	<u>14</u>
14	Printer	Unit	15
15	In Focus	Unit	1
16	Mesin Ketik	Unit	1
17	Handycamp	Unit	1
18	Scanner	Unit	3
19	Kipas Angin	Unit	5
20	AC Split	Unit	12
21	Meja Rapat	Unit	1

22	Layar Proyektor	Unit	1
23	Kursi Rapat	Unit	1
24	Sound system	Unit	1
25	Kamera Digital	Unit	5
26	Fire Extingulsher (Racun Api)	Unit	1

Pada tahun 2009 di resmikan laboratorium untuk melaksanakan standar pelayanan minimal lingkungan hidup, labor ini memiliki peralatan untuk pemeriksaan kualitas air dan Udara seperti: suhu, Ph (derajat keasaman) dan DO (oksigen terlarut). Keterbatasan alat mengakibatkan sedikitnya parameter kualitas air dan udara yang dapat diukur.

Pengoperasionalan labor ini telah dirumuskan pada tahun 2009. Kondisi saat ini peralatan yang dimiliki laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman masih banyak keterbatasan sesuai dengan standar Laboratorium Lingkungan Hidup (seperti dalam tabel berikut) :

**Infentarisasi Peralatan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota**

No	Nama Alat Labor Lingkungan Hidup	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	
1	Spektrofometer portable	1	Unit
2	Beaker Glass 100 ML	1	Unit
3	Beaker Glass 250 ML	1	Unit
4	Beaker Glass 1000 ML	1	Unit
5	Gelas Ukur 25 ML	1	Unit
6	Gelas Ukur 250 ML	1	Unit
7	Tabung Reaksi	24	Unit
8	Corong Kaca	2	Unit
9	Test Tube	1	Unit
10	Erlenmeyer ukuran 100 ML	3	Unit
11	Erlenmeyer ukuran 250 ML	2	Unit
(1)	(2)	(3)	
12	Erlenmeyer ukuran 1000 ML	1	Unit
13	Analitical Balance	1	Unit
14	Konduktometer	1	Unit
15	Buret	2	Unit
16	Rak Pipet	2	Unit
17	Centrifuge Manual	1	Unit
18	COD Analisis System	1	Unit
19	Hot Plate Stirir	1	Unit

20	Pipet Gondok ukuran 2 ML	2	Unit
21	Pipet Gondok ukuran 5 ML	2	Unit
22	Pipet Gondok ukuran 10 ML	2	Unit
23	Pipet takar ukuran 0,5 ML	2	Unit
24	Pipet takar ukuran 25 ML	2	Unit
25	Penjepit Tabung Reaksi	3	Unit
26	Sikat Tabung Reaksi	3	Unit
27	Sikat Tabung Reaksi	2	Unit
28	Bola Hisap	2	Unit
29	Kaca Arloji	2	Unit
30	Rak Tabung Reaksi	2	Unit
31	Peralatan Labor (Adwa, Portable, Ph, Conductivity, TDS meter, Temperature portable, Casio ProTrek)	1	Paket
32	Lemari Asam	1	Unit
33	Spektrofotometer	1	Unit
34	Spektrofotometer UV VIS 1800	1	Unit
35	Vacuum Pump	1	Unit
36	Desicator	1	Unit
37	Separately Funner Holder: for 2L	3	Unit
38	Shaker	1	Unit
39	Strirrer Hot Plate, digital	1	Unit
40	Turbidimeter	1	Unit
41	Water Sampler vertical	1	Unit
42	Current Meter	1	Unit
43	Alat Ph Meter	1	Unit
44	BOD Incubator	1	Unit
45	Sendok Zat Spatula	1	Unit
46	Derigen Sample isi	4	Unit
47	Derigen aquadest isi	2	Unit
48	Ice Box	1	Unit
49	Statif Burret	2	Unit
50	Jarum Oanase	3	Unit
51	Kertas Saring	5	Unit
52	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas air	1	Paket
53	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas tanah	1	Paket
54	Alat Pengujian Kualitas Udara Portable dan Perlengkapannya	1	Paket
55	Alat Pengujian Kualitas Air Portable dan Perlengkapannya	1	Paket
(1)	(2)	(3)	
56	Current Meter	1	Unit
57	Oven	1	Unit
58	Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Udara (High Volume Air Sampler)	1	Unit
59	pH Meter	1	Unit

#### D. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengembangan Perumahan Rakyat dan Permukiman. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

A. Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup

1. Terjadinya degradasi lingkungan;

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.

2. Peningkatan beban pencemaran;

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

3. Perubahan iklim;

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/ perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal

4. Penanganan Persampahan belum optimal

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan sampah, sehingga apabila tidak tertangani dengan baik dan optimal akan memberikan dampak terhadap lingkungan

B. Isu-isu Startegis Bidang Perumahan dan Permukiman

Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) Masyarakat Berpenghasilan Rendah, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya



Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan  
Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP
- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2019.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2019, serta Foto Piagam Penghargaan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

Dalam penyusunan Renstra ini harus mengacu kepada visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016– 2021. Adapun visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

#### **TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja oleh segenap stakeholder pembangunan. Berdasarkan Visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berdasarkan relevansi dan kolerasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada Misi ke 6 yaitu **Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.**

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada misi 6 yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam lingkup sasaran :

1. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatnya Tutupan Vegetasi
4. Terpeliharanya Daerah Resapan Air dan Sumber-sumber Air
5. Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7. Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah (Backlog)

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 10 program, yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Pengendalian polusi;
7. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8. Program Pengembangan Perumahan
9. Program Lingkungan Sehat Perumahan
10. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 yang merupakan bentuk Komitmen antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Program-Program Kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun

2019 berisi tentang Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target pada tahun anggaran bersangkutan. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman selama tahun 2019 adalah 10 program dan 35 kegiatan.

- C. Dalam tabel di bawah ini disajikan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang merupakan suatu bentuk komitmen antara Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Bupati Lima Puluh Kota, dimana kinerja yang ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang mendukung IKU Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk pencapaiannya, yaitu sebagai berikut:

#### **PERJANJIAN KINERJA**

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

TAHUN : 2019

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,5
2	Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	16,04
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	8,09

#### **PROGRAM DAN ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Pengembangan Perumahan	11,921,341,000
2	Lingkungan Sehat Perumahan	443,540,000
3	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11,926,208,000

4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,662,171,000
5	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.160.741.000
6	Perlindungan dan Konservasi SDA	334.226.600
7	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	120.425.000
8	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	952.348.000
9	Peningkatan pengendalian Polusi	126.616.000
10	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	356.166.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

**B. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Berisi realisasi dan persentase capaian indikator kinerja seperti pada tampilan tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Terjaganya Kualitas Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,5	66,93	101 %	Sangat tinggi
2	Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan	Persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak	16.04	22,35	139 %	Sangat tinggi

	Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan	Huni (%)				
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani (%)	8,09	8,09	100 %	Sangat tinggi
Rata-rata capaian indikator adalah 91,97 % dari 2 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja						

## B. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana uraian diatas bahwa pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Lingkungan Hidup dan urusan Perumahan, dengan 10 Program dan 35 Kegiatan.

### Sasaran Strategis 1

#### “Terjaganya Kualitas Lingkungan”

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Real 2017	Target 2018	Real 2018	Target 2019	Real 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	64.5	68.5	65	67.15	66,93	67,88

Saat ini upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan

lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, IKLH menjadi ukuran utama untuk sasaran Pokok Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan hidup pada RPJMN 2015-2019, dan diharapkan dapat mempertajam Prioritas Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

a. Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2019.

$$\begin{aligned}\text{IKLH diperoleh} &= (0,4 \times \text{IKTL}) + (0,3 \times \text{IKA}) + (0,3 \times \text{IKU}) \\ &= (0,4 \times 61,96) + (0,3 \times 51,67) + (0,3 \times 91,97) \\ &= \mathbf{25,784 + 15,666 + 26,481}\end{aligned}$$

$$\mathbf{\text{IKLH} = 67,88 \text{ (baik)}}$$

**Keterangan 1. IKU = Indek Kualitas Udara**

**2. IKTL = Indek Kualitas tutupan Lahan**

**3. IKA = Indek Kualitas Air**

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada angka 67.88 menunjukkan Lingkungan yang cukup berkualitas.

b. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 ( Terjaganya Kulaitas Lingkungan ) adalah:

**1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perasampahan.**

Pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebanyak 5 (Lima) Kegiatan dengan anggaran dana sebanyak Rp. 1.662.171.000.'

Pada Program ini pada tahun 2019 untuk meningkatkan Indek Kualitas Lingkungan Hidup disamping menggalakkan pengurangan pemakaian sampah Plastik di masyarakat dilakukan inovasi **sedekah sampah**, dimana inovasi ini adalah dengan menyediakan keranjang sebanyak 4 keranjang sampah pada tempat strategis dengan memilah jenis sampahnya sehingga masyarakat waktu melakukan sedekah sampah ke Keranjang/tong sampah telah terpilah, sampah-sampah yang telah terpilah (kertas,botol Plastik,dan sampah Ekonomis lainnya) setelah terkumpul lalu diantarkan ke Bank sampah yang ada di Nagari ,Masjid dan Sekolah dan akan di catat dalam tabungan sampahnya , hasil ekonomi dari sampah ini dipergunakan untuk



biaya pembangunan masjid, kegiatan di Sekolah dan Nagari, makanya di namakan sedekah sampah.

Disamping itu DLHPP pada tahun 2019 telah mendirikan 1 (satu) unit **Bank Sampah UNESA** di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, yang mana tujuannya disamping untuk Edukasi juga menampung dari penjualan sampah ekonomis di sekitar Kec. Harau dan sampah dari Perkantoran sekitar IKK sarilamak.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melalui Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan selalu melakukan sosialisasi dan Bimtek tentang penanganan Sampah kepada Nagari, Puskesmas, sekolah dan Masjid (BKMT) serta melakukan pembinaan kepada Bank Sampah yang telah ada di Nagari dan Sekolah sehingga diharapkan dari sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah ini sekitar 80 % sampah bisa tertangani dan bernilai ekonomis ,sehingga 20 % sampah yang di buang ke TPA Regional Payakumbuh hanya Residu saja yang tidak bisa di tangani, yang mana selama ini karna kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat hampir 100 % sampah di buang ke TPA regional dan ke Badan Sungai sehingga menyebabkan menjadi penyumbang terbesar dalam pencemaran Lingkungan Hidup.

Hasil dari semua Program yang dicanangkan DLHP serta didukung oleh Masyarakat pada Tahun 2019 Kab. Lima Puluh Kota memperoleh Penghargaan sebagai Peringkat 1 Gerakan Sumbar Bersih Provinsi kategori Kabupaten.

Untuk kedepannya DLHPP selaku OPD teknis akan merangkul BUMN untuk bisa mengalokasikan Program CSR Perusahaannya di Alokasikan untuk Program Lingkungan Hidup.

### Gambar III.1

#### Bimbingan Teknis Pengolahan sampah



Gambar III.2

Bank Sampah “UMESA” DLHPP



Gambar III.2

Kegiatan Transaksi di Bank sampah”UMESA”



Gambar III.3

CSR PLN untuk Sedekah Sampah dalam kepedulian Lingkungan



Gambar III.4  
CSR PLN untuk Sedekah Sampah dalam kepedulian Lingkungan



## 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan pada tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.2.160.741.000,' yaitu :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan hidup
3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
4. Pengkajian dampak Lingkungan
5. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)
6. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dampak Lingkungan
7. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pengambilan 12 sampel titik pantau pengujian kualitas Air yang tersebar pada sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada pengujian kualitas udara dilakukan titik pantau sampel sebanyak 4 lokasi titik pantau

**Titik Pantau Pengambilan Sampel**

**Pemantauan Kualitas Air tahun 2019**

No	Sungai /Limbah	Lokasi
1	Batang kapur	Kec. Kapur IX
2	Batang Malagiri	Kec. Pangkalan
3	Batang Tamaran	Kec. Pangkalan
4	Batang Kasok	Kec. Pangkalan
5	Batang Maek	Kec. Pangkalan
6	Batang Sinamar GO	Kec. G.Omeh
7	Batang Sinamar sebelum RSUD	Kec. Suliki
8	Batang Sinamar sesudah RSUD	Kec. Suliki
9	Batang Lampasi sungai beringin	Kec. Payakumbuh
10	Batang lampasi Sariak laweh	Kec. Akabiluru
11	Batang Harau	Kec. Harau
12	Batang sanipan	Kec.Harau

**Titik Pantau Pengambilan Sampel**

**Pemantauan Kualitas udara tahun 2019**

No	Kategori	Lokasi
1	Perkantoran	Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota
2	Arus Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
3	Industri	Usaha Pengolahan Tahu di Purwa Jaya
4	Permukiman	Perumahan kandang Lamo.

Gambar III.4

Pengambilan sampel Pengujian Kualitas Air di Batang kapur



Gambar III.5

Pengambilan sampel Pengujian Kualitas Air di Batang Malagiri



Gambar III.6

Pengambilan sampel Pengujian Kualitas Air di Batang Tamaran



Gambar III.7

Pengambilan sampel Pengujian Kualitas Air di Batang Maek



Gambar III.8

Pengambilan sampel Pengujian Kualitas udara di Dinas Perhubungan



Gambar III.8

Pengambilan sampel Pengujian Kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup  
Perumahan Rakyat dan Permukiman



Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasn ini Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan

Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CSR.

Pengawasan pada tahun 2019 telah di usulkan perusahaan untuk Peningkatan Peringkat Perusahaan (Proper) yaitu PTPN VI.

Pengaduan Masyarakat yang masuk tahun 2019 ini terkait masalah lingkungan sebanyak 8 (Delapan) pengaduan dan telah di proses sesuai peraturan yang berlaku.

**Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Tahun 2019**

No.	Perusahaan	Jadwal Peaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Perkebunan Nusantara Vi Unit Usaha Pkl	6 Februari 2019	Tidak Taat
2	CV. Tekad Jaya	7 Februari 2019	Tidak Taat
3	PT. Kamboja Mas	8 Februari 2019	Tidak Taat
4	PT. Mega Sejahtera Sugan	11 Maret 2019	Tidak Taat
5	PT. Astrindo Gita Mandiri	12 Maret 2019	Tidak Taat
6	CV. Atika Tunggal Mandiri	8 April 2019	Tidak Taat
7	CV. Halaban Sepakat	9 April 2019	Tidak Taat
8	PT. Cemerlang Calsium Dolomit	11 April 2019	Tidak Taat
9	PT. Statika Mitra Sarana	2 Mei 2019	Tidak Taat
10	PT. Sumbar Calsium Pratama	3 Mei 2019	Tidak Taat
11	PT. Sarana Bagus Nusantara	13 Mei 2019	Tidak Taat
12	PT. Bintang Sumatera Pasifik	14 Mei 2019	Tidak Taat
13	PT. Koral Kampar	17 Mei 2019	Tidak Taat
14	PT. Pebana Adi Sarana	18 Mei 2019	Tidak Taat
15	PT. Anugrah Tripa Raya	3 Juni 2019	Tidak Taat
16	RSUD. Achmad Darwis	4 Juni 2019	Tidak Taat
17	PT. Aceh Mineral Prima Development	13 Juni 2019	Tidak Taat
18	PT. Bumi Hijau Citra Andalas	4 Juli 2019	Tidak Taat
19	PT. Lima Karsa Sarana Bakti	5 Juli 2019	Tidak Taat
20	PT. Dempo Bangun Mitra	8 Juli 2019	Tidak Taat
21	PT. Cani Semesta Lestari	24 Juli 2019	Tidak Taat
22	CV. Gunung Nago Farm	25 Juli 2019	Tidak Taat
23	CV. Tekad Jaya	5 September 2019	Tidak Taat
24	PT. Koto Alam Sejahtera	6 September 2019	Tidak Taat



### Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Pihak yang Mengadukan</b>	<b>Perihal</b>	<b>Usaha</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	05 Januari 2019	H. Dahlan Sidiq, dkk	Pengambilan pasir dengan mesin donfeng	Pengambilan pasir di sungai	Jorong Sipingai Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak	Sudah diproses (tuntas)
2.	21 Januari 2019	Masyarakat	Laporan pencemaran lingkungan	Peternakan ayam potong	Nagari Harau Kec. Harau	Sudah diproses (tuntas)
3.	23 Januari 2019	Wali Nagari Kubang H. Syafri Ahmad	Laporan pencemaran lingkungan	Perikanan (pemberian pakan ikan)	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kecamatan Suliki	Sudah diproses (tuntas)
4.	20 April 2019	Wali Nagari Gn. Malintang	Permohonan mengatasi banjir	PTPN6 (sawit)	Nagari Gn. Malintang Kec. Pangkalan Kt. Baru	Sudah diproses (tuntas)
5.	5 Juli 2019	Masyarakat	Perusakan lingkungan	Penambangan pasir di sungai batang sinamar	Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau	Sudah diproses (tuntas)
6.	23 September 2019	Masyarakat	Matinya ikan di Batang Maek	Usaha pertambangan timah hitam	Nagari Tj. Balik Kec. Pangkalan Kt. Baru	Sedang ditindaklanjuti sedang diproses
7.	15 November 2019	Refidon Putra	Perusakan sebidang tanah perkebunan milik pribadi	Pembangunan gudang	Nagari Koto Tuo Lec. Harau	Sudah diproses (tuntas)
8.	17 Desember 2019	Masyarakat	Laporan pencemaran lingkungan	Peternakan ayam potong	Jorong Bukik Gombak Situak	Sudah diproses (tuntas)

					Nagari Mungo Kec. Luak	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

**PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LIMBAH B3  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

No.	Perusahaan	Jadwal Pelaksanaan Pengawasan
10	Puskesmas Rimbo Data	24 Juli 2019
2	Puskesmas Situjuah	25 Juli 2019
3	Puskesmas Gunung Malintang	26 Juli 2019
4	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	27 Juli 2019
5	Puskesmas Pangkalan	29 Juli 2019
6	Puskesmas Mungka	30 Juli 2019
7	Puskesmas Sialang	5 Agustus 2019
8	Puskesmas Muaro Paiti	6 Agustus 2019
9	Puskesmas Koto Tinggi	7 Agustus 2019
10	Puskesmas Padang Kandi	8 Agustus 2019
11	Puskesmas Batu Hampa	14 Agustus 2019
12	Puskesmas Munggo	15 Agustus 2019
13	Puskesmas Maek	19 Agustus 2019
14	Puskesmas Baruah Gunuang	20 Agustus 2019
15	Puskesmas Banja Laweh	21 Agustus 2019

**REKAP UKL-UPL Tahun 2019**

No.	Perusahaan	Lokasi WP	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)	Rekomendasi UKL-UPL	Ket
1	Kampung Sarosah	Lubuak Limpato Nagari Tarantang Kecamatan Harau	Pariwisata		01/UKL-UPL/ DLHPP/I/2019 Tanggal Januari 2019	
2	PT. Mutiara Batang Tabik	Batang Tabik Nagari Sei	Pariwisata		02/UKL-UPL/ DLHPP/IV/2019	

		Kamuyang Kecamatan Luak			Tanggal April 2019	
3	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	Gedung Kuliah dan Laboratorium		03/UKL-UPL/ DLHPP/IV/2019 Tanggal April 2019	
4	Bundo Kanduang	Tanjung Pati Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	Penginapan		04/UKL-UPL/ DLHPP/IV/2019 Tanggal April 2019	
5	PT. Pebana Adi Sarana	Mudiak Pasar Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Penambanga n dan Pengolahan Batu		05/UKL-UPL/ DLHPP/V/2019 Tanggal Mei 2019	
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lima Puluh Kota	Sarilamak, Kecamatan Harau	Pembanguna n Gedung Layanan Perpustakaan Daerah		06/UKL-UPL/ DLHPP/V/2019 Tanggal Juni 2019	
7	PT. Pebana Adi Sarana	Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Penambagan dan Pengolahan Batu		07/UKL-UPL/ DLHPP/VIII/ 2019 Tanggal Agustus 2019	
8	CV. Air Putih Tuah Nagari	Jorong Aia Putih Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau	Penginapan		08/UKL-UPL/ DLHPP/VIII/ 2019 Tanggal Agustus 2019	
9	PT. Bumi Piladang Mandiri	Jorong Ateh Koto Nagari Sulikin Kecamatan Suliki	Penambanga n Batuan Tras		09/UKL-UPL/ DLHPP/VIII/ 2019 Tanggal Agustus 2019	
10	PT. Limbas Surya Cipta Mandiri	Sopang Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru	Penambanga n dan Pengolahan Batu Andesit		10/UKL-UPL/ DLHPP/X/2019 Tanggal Oktober 2019	
11	PT. Manggilang Sumber Andesit	Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Penambanga n dan Pengolahan Batu Andesit		11/UKL-UPL/ DLHPP/X/2019 Tanggal Oktober 2019	
12	CV. Gunung Nago Farm	Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Peternakan Ayam Petelur		12/UKL-UPL/ DLHPP/X/2019 Tanggal Oktober 2019	
13	Pabrik	Jorong Padang	Pabrik Kertas		13/UKL-UPL/	

	Kertas Telur Makmur Jaya	Rantang Nagari Koto Kecamatan Harau	Telur		DLHPP/XI/2019 Tanggal November 2019	
14	PT. Koto Alam Sejahtera	Polong Duo Nagari Koto Kecamatan Pangkalan Baru	Penambanga dan Pengolahan Batu Andesit		14/UKL-UPL/ DLHPP/XI/2019 Tanggal November 2019	
15	CV. Tekad Jaya	Jorong Bulakan Nagari Tj. Gadang Kec. LSH	Penambanga dan Pengolahan Batu Andesit		15/UKL-UPL/ DLHPP/XII/2019 Tanggal Desember 2019	
16	CV. Patricia	Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru	Penambanga Batuan Sirtukil		16/UKL-UPL/ DLHPP/XII/2019 Tanggal Desember 2019	
17	Peternakan Ayam Petelur Rosena	Jorong Simpang Ampek Nagari Labuah Gunuang, Kec. LSH	Peternakan Ayam Petelur		17/UKL-UPL/ DLHPP/XII/2019 Tanggal Desember 2019	
18	Dinas PUPR Provinsi Sumbar	Nagari Sialag dan Galugua Kec. Kapur IX	Pembanguna Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Galugua		18/UKL-UPL/ DLHPP/XII/2019 Tanggal Desember 2019	

Gambar III.9

**Dokumentasi Hasil Pengawasan Lapangan ke PT. Pebana Adi Sarana di Jorong Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tanggal 9 Oktober 2019**

1. Penyimpanan Limbah B3 yang belum memenuhi ketentuan teknis



1. Cerobong asap pada proses AMP yang belum memenuhi ketentuan teknis dan Ceceran solar pada tangki penyimpanan solar



### 3. **Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam**

Sampai Kurun waktu tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman sudah melakukan berbagai inovasi dan Pembinaan dalam Bidang Lingkungan Hidup terutama pada kegiatan Kampung Iklim (Proklam) pada Nagari Binaan yaitu Nagari VII Koto Talago Kec.Guguak melalui Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian Tujuh Koto Talago Lestari dalam hal Pemanfaatan Limbah Ubi Kayu sebagai Biogas.

Dan pada tahun 2019 kelompok Proklam Binaan DLHPP memperoleh Anugerah peringkat 1 sebagai Pelaksana Proklam tingkat Provinsi, sebagai Pengembangan dari yang dicapai oleh Jorong Sebelumnya melalui kelompok Tani Baruah Anduriang Sepakat yang meraih Anugerah Pelaksana Proklam terbaik ditingkat Nasional tahun 2018.

Alokasi anggaran yang di alokasikan untuk Program ini pada tahun 2019 sebanyak Rp. 120.425.000,' dan pada kegiatan hari Lingkungan Hidup tahun 2019 juga telah dilaksanakan penanaman pohon di sepanjang jalan IKK Sarilamak dan kompleks perkantoran Pemda Kab. Lima Puluh Kota ..

Gambar III.10

**Pengambilan Penghargaan oleh Dinas Lingkungan Hidup kategori  
Pelaksana Proklim TK Provinsi Sumbar**



**4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.**

Keluaran dari Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mempengaruhi pada indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Terlaksananya Pembinaan Sekolah Adiwiyata yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan

Sedangkan Kegiatan yang mendukung Program ini adalah :

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
2. Pengembangan data dan Informasi Lingkungan.

Anggaran yang di Alokasikan pada Program ini sebanyak Rp.952.348.000,; hasil yang diharapkan dari program ini sebagai pendukung Sasaran Strategis 1 adalah :

1. Sekolah Adiwiyata di Kab.Lima Puluh Kota
2. Adanya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup , diharapkan dengan program ini menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dalam kegiatan sekolah menuju Lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan baik di dalam lingkup sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.

Pada kegiatan ini sebagai wujud untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam penyelamatan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melakukan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi warga sekolah dengan melakukan bimtek sekolah adiwiyata , sosialisasi tentang sekolah adiwiyat maupun berupa workshop dan kegaitan lainnya dengan melibatkan semua unsur yang terkait pada lingkungan sekolah.

Dari hasil Pembinaan dan kerjasama yang baik serta komitmen dari sekolah binaan Pada Tahun 2019 ini Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan penghargaan 3 Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan 20 Sekolah Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota

### **Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi dan Kabupaten**

No	Nama Sekolah	Kategori	
		Provinsi	Kabupaten
1	SDN 02 Koto Tengah Kec. Akabiru	√	
2	SDN 01 Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh	√	
3	MTsN 06 Piladang Kec. Akabiluru	√	
4	SDN 04 Sarilamak Kec. Harau		√
5	SDN 05 Sarilamak Kec. Harau		√

6	SDN 06 Sarilamak Kec. Harau		√
7	SDN 08 Sarilamak Kec. Harau		√
8	SDN 01 Taram Kec. Harau		√
9	SDN 01 Situjuh Gadang		√
10	SDN 02 Mungo Kec. Luak		√
11	SDN 06 Mungo Kec. Luak		√
12	SDN 01 Tj.Haro Sikabu-kabu Kec. Luak		√
13	SDN 02 Guguk VIII Koto Kec. Guguk		√
14	SDN 08 Guguk VIII Koto Kec. Guguk		√
15	SDN 05 VII Koto Talago Kec. Guguk		√
16	SDN 01 Koto Bangun Kec. Kapur IX		√
17	SDN 03 Koto Bangun Kec. Kapur IX		√
18	SDN 03 Muaro Paiti Kec. Kapur IX		√
19	SDN 02 Piobang Kec.Payakumbuh		√
20	SDN 01 Bukik Limbuku Kec. Harau		√
21	SMPN 03 Lareh Sago Halaban		√
22	SMPN 2 Harau Kec. Harau		√
23	MTsN 5 Kab. Lima Puluh Kota		√

**Gambar III.9**

**Bimtek Sekolah Adiwiyata tahun 2019**





**Pembinaan Sekolah Adiwiyata tahun 2019**



**Gambar III.11**

**Sosialisasi Sekolah Adiwiyata SDN 01 Situjuah Gadang Kec. Situjuah  
Limo Nagari**



**Gambar III.12**

**Kondisi Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lima Puluh Kota**



Analisa Keberhasilan capain indikator dari program ini untuk mencapai sasaran adalah :

1. Adanya Pembinaan secara teratur dan terprogram dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman selaku pembina kepada sekolah-sekolah di Kab.Lima Puluh Kota.
2. Adanya dukungan dari kepala daerah dan legislatif terhadap program adiwiyata.
3. Adanya Komunikasi yang baik antara
4. pihak sekolah dengan instansi pembina.

Solusi peningkatan untuk masa yang akan datang adalah peningkatan SDM dengan melakukan Pembinaan, sosialisasi, Bimtek serta workshop kepada sekolah-sekolah adiwiyata serta ditunjang dengan ketersediaan anggaran untuk menunjang program ini.

#### 5. **Program Peningkatan Pengendalian Polusi**

Capaian yang diharapkan terwujudnya Pengendalian Polusi Emisi Kendaraan bermotor di Kab. Lima Puluh Kota,

Pada Program ini ada 3 Kegiatan untuk mendukung sasaran strategis 1 yaitu :

1. Pengujian Emisi Kendaraan bermotor
2. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah cair
3. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan Pencemaran

Tahun 2018 telah dilakukan pengujian emisi kendaraan dinas roda 4 (empat) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan , dan melakukan pengujian kadar Limbah Padat dan Limbah Cair di RSUD Ahmad Darwis Kecamatan Suliki dan Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Pengolahan Limbah Cair .

**Gambar III.10**  
**Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor**



## Sasaran Strategis 2

**“Terbangunnya Insfrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan  
Kebutuhan Pengembangan Wilayah Perumahan”**

No	Indikator Kinerja	Target RPJM D	Target 2017	Real 2017	Target 2018	Real 2018	Target 2019	Real 2019
1	2	3	4	5	6	7		
1	Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni (%)	-	0.33	0.33	23.15	23.15	23,15	23,35
2	Persentase PSU Perumahan	-	0.63	0.63	2.09	2.07	8.09	8.09

No	Indikator Kinerja	Target RPJM D	Target 2017	Real 2017	Target 2018	Real 2018	Target 2019	Real 2019
1	2	3	4	5	6	7		
	dan Permukiman yang Tertangani (%)							

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan ,air bersih dan penyehatan lingkungan.

Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Program yang mendukung sasaran strategis 2 ( dua) adalah :

**1. Program Pengembangan Perumahan.**

Pada Tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota terbangun sebanyak 1.019 unit rumah layak huni baik pembangunan Baru maupun rehap sedang dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni(RLH).

Sumber Pendanaan Peningkatan rumah layak huni di Kab. Lima Puluh Kota berasal dari 4 Sumber Pembiayaan /Kategori

1. APBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 275 unit dengan pagu anggaran per unit Rp.30.000.000

2. APBD Provinsi (BSPS) sebanyak 440 unit dengan pagu dana per unit Rp. 17.500.000
3. APBN melalui Program Perumahan Strategis sebanyak 126 unit dengan anggaran Per unit Rp.17.500.000
4. Dari dana DAK Perumahan sebanyak 178 unit dengan anggaran Rp.17.500.000

Dilihat dari sumber pendanaan dan program yang dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan peningkatan Rumah Layak Huni yang pengusulannya berasal dari Renja OPD.Musrenbang dan Reses DPRD dan yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai mana table di bawah ini.

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kecamatan Gunung Omeh	2 unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	50 unit
3	Kecamatan Suliki	8 Unit
4	Kecamatan Guguk	19 unit
5	Kecamatan Mungka	44 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	31 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	6 Unit
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	7 Unit
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	28 Unit
10	Kecamatan Luak	21 Unit
11	Kecamatan Harau	38 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	8 Unit
13	Kecamatan Kapur IX	13 Unit

2. APBD Provinsi Sumatera Barat (BSPS) yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu merupakan bantuan rehab bagi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni  
Tahun 2019 kabupaten memperoleh dana BSPS dari Provinsi sebanyak 440 unit Rumah yang tersebar di 9 Kecamatan sebagai mana rekapitulasi di table berikut :

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kecamatan Pangkalan	30 unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	30 unit
3	Kecamatan Harau	30 Unit
4	Kecamatan Luak	30 unit
5	Kecamatan Mungka	70 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	31 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	100 Unit
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	30 Unit
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	60 Unit

3. APBN melalui Program Perumahan Strategis sebanyak 126 unit dengan anggaran Per unit Rp.17.500.000 adalah Pembangunan Rumah layak Huni yang di peruntukan untuk rehabilitasi bagi daerah pasca bencana di Kabupaten Lima puluh Kota tahun 2019 ada 2 Kecamatan yang dapat Program Perumahan Strategis yaitu:

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kecamatan Akabiluru	32 unit
2	Kecamatan Kapur IX	94 unit

4. Dari dana DAK Perumahan sebanyak 178 unit dengan anggaran Rp.17.500.000 yaitu Khusus bantuan perumahan pada daerah yang masuk dalam kawasn Kumuh untuk kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 kecamatan Payakumbuh yang masuk dalam SK Bupati Kawasan Kumuh.

Keluaran dari program ini adalah terlaksananya pembangunan / rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kegiatan Pembanguna Sarana dan Prasarana sederhana sehat, Pencapaian Indikator persentase Peningkatan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni senantiasa menunjukkan kenaikan selama 3 tahun terakhir sejak tahun tahun 2017 s/d 2019, pada tahun tahun 2017 mencapai 0. 33 Persen dan



pencapaian pada tahun 2019 naik sebesar 22.35 Persen, dimana pada 3 tahun terakhir teralisasi 100% dari target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan kegiatan Perumahan yang bersumber dari APBD Kab.Lima Puluh Kota pada tahun 2019 dilakukan dengan 2 metode yaitu;

1. Swakelola yang bekerja dengan dengan KODIM 0306 / 50 Kota sebanyak 150 unit tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kontraktual yang dilakukan dengan pihak ketiga / kontaktor sebanyak 125 unit

Program yang dicanangkan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) yaitu bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan keswadayaandalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum..

Bentuk bantuan BSPS ini ada yaitu berupa uang dan dalam bentuk barang, Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman bantuannya berupa uang (bansos), persyaratan dan ketentuan mengenai mengenai BSPS ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 /PRT/M/2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya.

### Gambar III.11

#### **Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**



### **C . PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

## 1. Permasalahan dan solusi

### a. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman.

#### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		Internal	Eksternal	
Kualitas Air	13 titik pantau, beberapa parameter menunjukkan adanya peningkatan indikator pencemaran air	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air</li><li>- SDM pemantauan kualitas air masih terbatas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih adanya masyarakat yang membuang sampah domestik ke sungai</li><li>- Adanya perusahaan yang membuang limbah cair ke badan sungai</li></ul>	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan lingkungan Hidup
Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Baru dapat melaksanakan pemantauan kualitas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SDM operator pemantau kualitas udara yang terbatas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih adanya perusahaan yang tidak melaksanakan</li></ul>	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan lingkungan Hidup

	<p>udara pada 4 titik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan peralatan uji kualitas udara yang sudah ada belum optimal</li> </ul>		<p>pengendalian pencemaran udara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada masyarakat yang melaksanakan pembakaran sampah dan lahan secara sembarangan</li> </ul>	
<p>Penanganan Kasus Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh Pengaduan atas adanya dugaan pencemaran lingkungan teladak lanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana usaha/ kegiatan masih tidak taat lingkungan</li> <li>- Masyarakat masih kurang peduli apabila terjadi pencemaran lingkungan sehingga tidak melapor</li> </ul>	
<p>Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan setiap tahun meningkat</li> <li>- Objek pengawasan lingkungan semakin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Pengawasan pengelolaan lingkungan perusahaan masih terbatas</li> <li>- Sarana dan Prasarana yang terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua Perusahaan yang memiliki izin lingkungan sadar akan kewajiban melakukan</li> </ul>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pemantauan</p>

	n mening kat		pengelolan lingkung an	
Pengelolaan persampahan	- Baru 10 % sampah yang terkelola	- Armada pengangkut sampah belum memadai - Belum memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan persampahan	- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber - Luas wilayah kabupaten yang cukup luas untuk cakupan layanan	Belum adanya regulasi daerah terkait pengelolaan persampahan

### **b. Identifikasi Permasalahan Urusan Perumahan**

- a. Belum Mantapnya Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
- b. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
- c. Masih Lemahnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan.
- d. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
- e. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.

### **c. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.**

1. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

2. Pembangunan prasarana dan sarana di kawasan Perumahan
3. Menyempurnakan kelembagaan yang mengatur perumahan dan kawasan.

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 33.804.245.099,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 30.425.434.935,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.378.810.164,- yang merupakan belanja gaji dan tunjangan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis berjumlah Rp. 29.023.845.935,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 28.375.033.874,- atau tingkat serapan sebesar 97.76%.

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2018 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :



**Tabel : Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2019**

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>APBD 2019 (RP)</b>	<b>APBD-P 2019 (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>%</b>	<b>EFISIENSI</b>
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.662.171.000	1.832.515.810	1.813.395.007	98.95	Efisien
2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.160.741.000	1.865.197.025	1.680.626.415	52.23	Efisien
3	Perlindungan dan Konservasi SDA	334.226.600	333.614.600	305.599830	84.26	Efisien
4	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	120.425.000	119.323.000	108.748.800		Efisien
4	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	952.348.000	956.518.000	948.585.800	99.18	Efisien
5	Peningkatan pengendalian Polusi	126.616.000	126.616.000	100.4124.300	52.47	Efisien



6	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	356.166.000	267.510.500	261.349.100	97.69	Efisien
7	Pengembangan Perumahan	8.806.341.000	8.920.779.000	8.830.797.113	99.70	Efisien
8	Lingkungan Sehat Perumahan	443.540.000	643.540.000	638.748.096	99.90	Efisien
9	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	11.926.208.000	13.958.032.000	13.687.539.413	99.92	Efisien

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat yang dipimpin seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melaksanakan 10 program dan 35 kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, dialokasikan dana pada awalnya berjumlah Rp. 25.936.164.600,- seiring dengan Perubahan APBD Tahun 2019, mengalami perubahan menjadi Rp. 29.023.645.935,- Adapun realisasi keuangannya adalah sebesar Rp 28.375.333.874,' atau tingkat serapan sebesar 97.76%.

Untuk pencapaian target-target dari indikator kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan, ada 10 (Sepuluh) program dengan 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan secara umum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sangat signifikan memberikan kontribusi pada pencapaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sudut akuntabilitas, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2019 adalah relatif baik. Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman selaku pelaksana urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat

#### **4.2 LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG**

Secara umum hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 hanya berupa keterlambatan administrasi baik administarsi keuangan, perencanaan maupun proses pengadaan yang melibatkan pihak ketiga serta stakeholders maupun OPD terkait,. Menyikapi hambatan tersebut maka untuk tahun mendatang diperlukan percepatan penyelesaian administrasi dan perencanaan yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



**Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019**



**Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2019**



**Piagam Penghargaan Kecamatan Bersih Tingkat Provinsi Sumbar tahun 2019**



**Tropi Gerakan Sumbar Bersih Tahun 2019**